

PERSPEKTIF PENYULUHAN PERTANIAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJATAN PETANI

Hery Bachrizal Tanjung

Abstract: *Agricultural extension in Indonesia has been coopted by the national interest to increase food production, or specifically to achieve self-sufficiency in rice. This situation has brought about the farmers' society dependent and ignorant, losing their sovereignty. The paper offers a perspective of agricultural extension in order to empower the farmers. As the nature of extension is to promote society's potential and competency, its practices should have not been top-down, linear, and instructive.*

Key word: *penyuluhan, petani, pertanian, pembangunan, masyarakat*

DEHUMANISASI PETANI SEBAGAI MASALAH PENYULUHAN PERTANIAN

Penyuluhan pertanian Indonesia sebagai pemegang mandat dan pelaksana pendidikan pertanian di tingkat petani (Abbas, 1995; Slamet, 1995; dlsb), sedang menghadapi tantangan berat dewasa ini. Tantangan tersebut tercermin dari pernyataan dua pakar penyuluhan pembangunan Indonesia, berikut: "Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras tahun 1984 melalui program Bimbingan Massa¹] justru membawa ma-

lapetaka bagi penyuluhan pertanian, karena secara tidak disadari banyak orang yang mempersepsikan bahwa penyuluhan pertanian itu adalah juga alat untuk meningkatkan produksi pertanian (sebagai salah satu komponen Bimas), seperti halnya pupuk dan insektisida; dan bukan sebagai usaha tersendiri yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan petani" (Slamet, 2001).

"Penyuluhan pertanian tanpa disadari telah menyimpang dan tidak menghasilkan perubahan esensial, yaitu petani yang rasional dan mandiri, tetapi justru menjadikan petani yang selalu tergantung kepada dan digantung oleh pemerintah" (Padmanagara, 1995).

Soebiyanto (1998), Sumardjo (1999), dan Puspadi (2001) di dalam disertasinya masing-masing, mem-

¹ Bimbingan Massal (Bimas) adalah program pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pencapaian swasembada pangan (khususnya beras) melalui peningkatan produktivitas pertanian padi, dengan aplikasi paket input produksi: benih unggul hasil pemuliaan, pupuk buatan untuk meningkatkan unsur hara lahan, pestisida dan insektisida untuk mencegah hama dan penyakit tanaman, irigasi yang cukup, bimbingan dan penyuluhan, kredit usahatani, dan intervensi pemerintah. Bimas yang dimulai tahun 1966 merupakan kelanjutan lebih terkonsolidasi dari proyek

Demonstrasi Massal penerapan Panca Usahatani setelah ditemukannya benih unggul padi oleh IPB tahun 1963 (Abbas, 1995).

perjelas tantangan berat penyuluhan pertanian, dengan melukiskan kinerja kelembagaan penyuluhan pertanian mutakhir yang telah kritis dan stagnan untuk menggerakkan kegiatan transfer teknologi produksi kepada petani guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian selama ini. Bahkan diperlukan paradigma baru jika ingin mengarahkan program penyuluhan pertanian kepada yang bersifat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan menuju kemandirian petani.

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan, penyuluhan pertanian telah terjebak menjadi bagian dari program peningkatan produksi pertanian nasional melalui Bimas. Penyuluhan pertanian yang lebih berorientasi peningkatan produksi, menurut pandangan Wahono (1994); Fakhri (1996; 1999); Reijntjes, Haverkort dan Waters-Bayer (1999); dan Mubyarto (1999), memang berhasil mendorong terjadinya proses adopsi secara intensif dan ekstensif oleh petani terhadap input-input pertanian hasil teknologi biologi (benih unggul) dan teknologi kimiawi (pupuk buatan, pestisida dan insektisida). Tetapi proses adopsi tersebut justru menyebabkan robohnya kelembagaan dan budaya pertanian lokal (yang telah tumbuh-kembang berabad-abad sebelumnya), dan sekaligus menjadi mesin penggerak keuntungan besar dari perusahaan kapitalis global produsen input-input pertanian tersebut. Sebagai contoh, hilangnya kontrol dan kepemilikan petani atas plasma nutfah benih padi asli-lokal pedesaan (yang beralih ke perusahaan global produsen

benih unggul), karena petani meninggalkan pemakaian benih padi asli-lokal dan mengadopsi benih unggul secara intensif.² Dengan kata lain penyuluhan pertanian ikut di dalam proses menuju *dehumanisasi petani* secara pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik; serta tidak memiliki model kelembagaan yang memberikan apresiasi terhadap hak-hak petani untuk menjadi *petani sejati*³, yaitu petani yang berdaya secara sosial-ekonomi dan berwawasan kelestarian ekologis.

Berbagai upaya menuntut dan memperkuat hak-hak petani muncul di banyak tempat. Misalnya, bersamaan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Pangan Dunia FAO di Roma pada November 1996, dilaksanakan forum koalisi masyarakat

² Beberapa tahun sebelum TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terjadi penjarahan benih unggul asli-lokal tanaman pangan, terutama padi, (atas nama penelitian untuk menghasilkan benih unggul dalam rangka revolusi hijau) di seluruh dunia (benih asli-lokal dinyatakan tidak unggul dengan tingkat produktivitas rendah). Benih padi asli-lokal Indonesia yang dinyatakan sudah punah di tataran pedesaan, namun ternyata setidaknya ada 257 jenis benih yang tersimpan di IRRI milik USA (Valve, 1998 dalam Wahono, 1999).

³ **Petani sejati** adalah petani lelaki dan perempuan yang hidup dalam relasi sosial yang adil dan tanpa dehumanisasi dengan hak-hak yang dimilikinya; yaitu hak yang berkaitan dengan proses memelihara, memperbaiki, dan menyediakan keanekaragaman sumberdaya genetik tanaman; juga memperoleh keadilan harga, informasi produksi dan pasar yang benar, bertani berkelanjutan secara ekologis, dan hak atas tanah (FAO, dalam Fakhri, 1999). Maka petani sejati adalah petani yang berdaya secara sosial-ekonomi dan berwawasan kelestarian ekologi.

sipil dunia yang peduli pertanian dan pangan untuk memperjuangkan aspirasi petani dalam Konferensi Pangan tersebut (Wiryo, 1996). Aspirasi petani adalah : (a) memperluas partisipasi petani dan wanita tani, (b) memperkenalkan pendekatan pertanian agroekologis dan organik, (c) menerapkan prinsip kecukupan sendiri dan menghindari ketergantungan pada perdagangan luar, (d) melakukan reformasi agraria, (e) menghormati pengetahuan masyarakat adat, dan (f) mengembangkan keanekaragaman hayati sumber bahan pangan untuk memenuhi kecukupan pangan global.

Pekerjaan besar yang harus dilakukan adalah menemukan model kelembagaan penyuluhan pertanian tertentu, agar aspirasi yang sebangun dengan hak-hak petani tersebut dapat menjadi kesadaran penuh dan perilaku aktual petani untuk mewujudkan petani sejati, justru di tengah iklim sosial-ekonomi-politik yang menurut Wahono (1999a) menghambat terwujudnya petani sejati, yaitu hegemoni negara dan dominasi praktek pergerakan modal perusahaan global, serta sikap petani yang takut menanggung resiko. Pada kondisi ini jadi menarik menelaah pemikiran Gramsci (1971) dalam Fakih (1996) yang melukiskan pendidikan, budaya dan kesadaran kritis, sebagai daerah perjuangan yang sangat penting untuk melawan hegemoni negara dan dominasi modal, sekaligus melakukan transformasi sosial menuju relasi sosial yang lebih adil.

“Masyarakat dengan relasi sosial yang lebih adil” dikemukakan oleh

para pakar dalam beberapa terminologi berbeda (sesuai ilmu dan fokus studi pakar tersebut)⁴, yang intinya melukiskan kualitas masyarakat idaman di mana semua warga termasuk petani menjalani kehidupan dengan hak-hak dan kewajiban yang ada secara manusiawi dan adil (Fakih, 1999). Korten (2002) merindukan masyarakat pasca-kapitalisme berpusat pada kehidupan (bukan pada pertumbuhan ekonomi) sebagai masyarakat beradab yang adil, lestari dan peduli terhadap sesama. Dalam konteks pembangunan pertanian, ada tiga konsep yang dapat disimak menjadi pintu masuk mencapai masyarakat idaman itu, yaitu: (a) pertanian berkelanjutan dengan input-luar rendah/*Low External Input and Sustainable Agriculture* (Reijntjes, Haverkort, and Waters-Bayer, 1999); (b) pertanian organik yang didukung oleh masyarakat/*Organic and Community-Supported Agriculture* (Korten, 2002); dan (c) pertanian yang peduli kepada sesama, alam semesta, kearifan lokal, dan keanekaragaman hayati (Wahono, 2004). Ketiga konsep tersebut berakar pada konsep pertanian berkelanjutan (*Sustainable Agriculture*) yaitu pertanian yang mantap secara ekologis, berkelanjutan secara ekonomi, adil dalam distribusi sumberdaya, bersifat manusiawi dan

⁴ Beberapa terminologi para pakar untuk menjelaskan kualitas masyarakat idaman tersebut adalah : *Civil Society* (Gramsci, 1971), *The Good Society* (Bellah, 1992), *The Spirit of Community* (Etzioni, 1993), Demokrasi Sosial dalam *The Third Way* (Giddens, 1998), Masyarakat Madani (Madjid, 1999), Masyarakat Adab (Wirutomo, 2001).

adaptif (Gips, dalam Reijntjes, Haverkort and Waters-Bayer, 1999).

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan pokok yang mesti dijawab adalah: model kelembagaan penyuluhan pertanian yang bagaimanakah yang handal untuk mewujudkan kesejahteraan petani di dalam konteks pembangunan pertanian berkelanjutan? Pertanyaan itu mesti dijawab melalui penelitian mendalam dan komprehensif, namun untuk artikel yang terbatas kapasitasnya, pertanyaan dasar yang hendak dijawab melalui telaah literatur adalah: bagaimana perspektif penyuluhan pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan petani itu tersebut?

PENYULUHAN PEMBANGUNAN MEMBENTUK MASYARAKAT BERMARTABAT

Pembangunan adalah upaya mencapai taraf hidup rakyat yang lebih ber-kualitas sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Berbagai kajian banyak menyatakan, partisipasi rakyat yang besar seharusnya ada di dalam seluruh proses pembangunan agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya berarti pengerahan tenaga kerja rakyat secara sukarela, tetapi justru yang lebih penting tergeraknya rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersedia melalui pembangunan guna memperbaiki kualitas hidupnya sendiri (Slamet, 1992; 2003). Namun pengalaman empiris menunjukkan tidak dengan sendirinya rakyat mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Kemampuan rakyat

untuk berpartisipasi dalam pembangunan harus didahului oleh *proses belajar* untuk memperoleh dan memahami informasi, serta memprosesnya menjadi pengetahuan tentang adanya kesempatan-kesempatan bagi dirinya, kemudian melatih dirinya agar mampu berbuat dan termotivasi untuk bertindak. Jika rakyat telah bertindak menuju perbaikan kehidupannya, barulah dikatakan rakyat telah berpartisipasi dalam pembangunan (Slamet, 1992; 2003 dan Sumardjo, 1999).

Agar tujuan pembangunan dapat dicapai secara baik dan dalam waktu relatif singkat, diperlukan usaha-usaha khusus yang bersistem dan berstrategi di bidang pendidikan non-formal yang berfungsi memfasilitasi rakyat mengalami proses belajar agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan untuk memperbaiki diri sendiri. Inilah ruang lingkup peran strategis penyuluhan pembangunan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu tugas itu menjadi lebih mudah, adalah ilmu penyuluhan pembangunan. Ilmu penyuluhan pembangunan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pola perilaku manusia pembangunan terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah, sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan perilaku baru yang membawa perbaikan kualitas hidup orang yang bersangkutan (Slamet, 1992).

Ilmu penyuluhan pembangunan memulai proses perkembangannya dengan meminjam dan merangkum konsep-konsep dari berbagai disiplin

ilmu yang relevan, seperti ilmu pendidikan, psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan manajemen. Penyuluhan pembangunan selalu fokus kepada perbaikan mutu kehidupan manusia, secara lahir dan batin, sehingga kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan erat dengan ilmu-ilmu lain, seperti ekonomi, pertanian, kesehatan, dan ilmu-ilmu kesejahteraan sosial lainnya. Ilmu penyuluhan pembangunan tidak akan pernah berdiri sendiri, tetapi sering dikatakan bersifat interdisiplin (Slamet, 1992). Ilmu penyuluhan pembangunan, pada awal kegiatannya dikenal sebagai penyuluhan pertanian (*Agricultural Extension*) yang berkembang di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris dan Belanda. Kemudian penggunaannya ternyata meluas pada bidang-bidang lain, maka namanya menjadi *Extension Education*, yang di beberapa negara disebut *Development Communication*. Meskipun ada perbedaan, namun pada dasarnya semua mengacu kepada disiplin ilmu penyuluhan pembangunan, sebagai pengembangan dari penyuluhan pertanian.

Falsafah dasar ilmu penyuluhan pembangunan adalah menolong orang, agar orang tersebut mampu menolong dirinya, melalui pendidikan, yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau "*to help people to help themselves through educational means to improve their level of living*" (Slamet, 1969). Dalam falsafah dasar itu terkandung makna dan prinsip-prinsip hakiki penyuluhan, yaitu penyuluhan adalah proses: (a) pendidikan, (b) dialogis, (c) konvergen, (d) demokratis,

dan (e) berkelanjutan; yang akan mampu memberdayakan masyarakat, serta bukan praktek penyuluhan yang bersifat linier, *top-down* dan mengabaikan potensi masyarakat, yang akan memperdayakan dan menciptakan ketergantungan masyarakat (Sumardjo, 1999).

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, memandu masyarakat peserta penyuluhan untuk melakukan perubahan perilaku dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotoriknya; sebagai proses demokrasi, penyuluhan memfasilitasi suasana bebas bagi pengembangan kemampuan peserta penyuluhan dalam berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalah, merencanakan dan bertindak secara bersama-sama, dari, oleh dan untuk mereka; sebagai proses berkelanjutan, penyuluhan dimulai dari keadaan petani pada waktu itu menuju ke arah yang mereka kehendaki, berdasarkan kebutuhan dan kepentingan yang selalu berkembang yang dirasakan oleh peserta penyuluhan (Sumardjo, 1999). Bila penyuluh melihat adanya satu kebutuhan, namun kebutuhan itu belum dirasakan oleh peserta penyuluhan, padahal kebutuhan itu dinilai sangat mendesak, maka penyuluh terlebih dahulu perlu berusaha melakukan proses penyadaran akan kebutuhan nyata itu (*real need*) menjadi kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) oleh peserta penyuluhan. Dengan demikian, penyuluhan bukan sekedar kegiatan penerangan tentang kebijakan penguasa, bukan hanya kegiatan disseminasi teknologi produksi, bukan pula program kedermawanan yang darurat, dan bukan program

untuk mencapai tujuan yang bukan kepentingan kelompok sasaran. Penyuluhan pembangunan adalah program pendidikan luar sekolah yang bertujuan memberdayakan sasaran, meningkatkan kesejahteraan sasaran secara mandiri, dan membangun masyarakat madani (Slamet, 2000). Oleh karenanya, Susanto (2000) menegaskan, praksis penyuluhan pembangunan tidak boleh terjebak dalam tatanan masyarakat atau politik yang *top-down*, serba seragam, mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat arus bawah, tidak demokratis, serta tidak kompetisi bebas dan terbuka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menurut Susanto (2000), harus dimaknai sebagai *people's programme facilitated or help by the government*; dimana yang terjadi adalah proses pemberian pengakuan dan penghargaan (*recognition*) kepada potensi masyarakat, menuju penguatan jati diri dan harkat martabat masyarakat. Karena pentingnya konsep partisipasi dan pembangunan masyarakat yang bersifat *bottom-up*, maka ilmu penyuluhan pembangunan harus masuk kepada ranah perilaku yang terkait fenomena martabat dan harkat manusia, dengan melakukan dua peran sekaligus, yaitu : (a) melakukan proses penyadaran, agar masyarakat tahu, mau, dan mampu meningkatkan perilaku yang lebih bermartabat, dan (b) menjembatani kesenjangan (*bridging the gap*) antara pola-pola perilaku lama yang cenderung menyebabkan masyarakat tidak kunjung terangkat dari kondisi ketidak-berdayaan dan stagnan, dengan

pola perilaku baru yang diinginkan sesuai dengan cita-cita hakiki pembangunan, yang dilukiskan oleh Misra (1981) sebagai "*real meaning of development is an increasing attainment of one's own cultural values*"⁵. Masyarakat bermartabat adalah, individu atau kelompok individu di dalam masyarakat yang ketika melakukan proses pemenuhan segala kebutuhannya selalu sadar tentang kewajiban dan hak-haknya, tidak mengambil yang bukan haknya, memegang teguh aturan dan tatanan sosial tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta mengembangkan budaya penghormatan terhadap harga diri sendiri dan orang lain (Bellah, 1992; Etzioni, 1993; Giddens, 1998; Madjid, 1999; Wirutomo, 2001). Jika masyarakat telah memiliki perilaku yang lebih berbudaya dan bermartabat, maka ilmu penyuluhan pembangunan dapat dikatakan berhasil dalam perannya di tengah masyarakat. Dengan pemikiran di atas, Susanto (2000) percaya akan diperoleh tiga keuntungan sekaligus, yaitu : (a) tumbuh berkembangnya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, (b) semakin berkurangnya beban dan tanggungjawab administratif pemerintah karena se-

⁵ Pencapaian taraf hidup yang lebih baik dan sejahtera sebagai hasil pembangunan, menurut Misra (1981), dicirikan empat indikator, yaitu : (a) tersedianya barang dan jasa bagi keberlanjutan hidup dasar manusia untuk semua secara lebih banyak dan lebih baik, (b) penghormatan terhadap harga diri sendiri dan orang lain, (c) bebas dari segala bentuk tirani dan kekerasan, dan (d) kehidupan masyarakat yang mempunyai dan memberikan rasa memiliki.

makin berkurang ketergantungan masyarakat terhadap aturan-aturan pemerintah, dan akhirnya (c) akan muncul kondisi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Sebagai cermin, ada baiknya sedikit menelaah tentang masyarakat kota Madinah semasa Khalifah Rasul, yang menurut Bellah (dalam Madjid, 1999) memiliki tatanan sosial politik sangat modern, bahkan terlalu modern untuk zaman dan tempatnya. Masyarakat Madinah tersebut memiliki ciri-ciri modernitas yang nantinya diidentifikasi sebagai penciri utama *civil society* atau masyarakat madani atau masyarakat berperadaban. Ciri-ciri modernitas itu adalah: (a) memiliki tingkat komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang tinggi dari seluruh masyarakat, (b) ada keterbukaan posisi kepemimpinan dengan ukuran kecakapan pribadi atas dasar pertimbangan obyektif, universal dan bukan keturunan, (c) menegakkan prinsip kemajemukan, toleransi, serta mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh anggota masyarakat tanpa memandang agama dan suku (kota Madinah terdiri dari beragam agama dan suku) berdasarkan Piagam Madinah atau disebut Konstitusi Madinah (sebagai dokumen politik pertama dalam sejarah umat manusia), dan (d) masyarakat yang tunduk dan patuh kepada ajaran kepatuhan dalam supremasi hukum dan peraturan.

Masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mengemban amanah pemimpinnya, yang dikemukakan pada kesempatan khutbah perpisahan; yaitu *life, property, and dignity* atau *life, fortune, and sacred honor*. Suatu

amanah yang bertolak dari kesucian hidup, harta, dan martabat kemanusiaan, sehingga tidak boleh dilakukan pengambilan tanpa hak atasnya. Inilah masyarakat bertaqwa yang mewujudkan titah suci Tuhan: *Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling me-kenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa* (Q.S. 49 : 13). *Berbuatlah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa* (Q.S. 5 : 8). Ketaqwaan yang dimaksud bukan kesalahan ritual individu belaka, tetapi yang paling penting kesalahan sosial yang berwujud selalu mampu berbuat adil di tengah masyarakat. Menurut Madjid (1999) inti pernyataan ini menyebar ke dunia Barat melalui filsafat kemanusiaan Gionavi Pico della Mirandola dan juga kepada John Locke yang mempengaruhi pemikiran para pendiri Amerika Serikat, sehingga dapat dibaca dalam *Declaration of Independence*. Masyarakat dengan ciri-ciri demikian, menurut Slamet (2000) adalah masyarakat yang berdaulat, komunikatif, menerima pluralitas, adaptif terhadap perubahan, swadaya tinggi, selalu mengembangkan diri, tahu apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya, dan berani mengambil keputusan. Sejalan dengan itu, untuk masyarakat Indonesia saat ini, menurut Kuntowijoyo (1998) dibutuhkan ilmu-ilmu sosial profetik, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke mana, untuk apa dan

oleh siapa transformasi sosial itu dilakukan. Nilai dasar arah yang ditawarkan Kuntowijoyo untuk perubahan sosial adalah *humanisasi, emansipasi, liberasi dan transendensi*, yang diderivasi dari misi historis Islam yaitu:

Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah manusia untuk menegakkan kebaikan (al-ma'ruf atau humanisasi dan emansipasi), mencegah kemungkaran (liberasi atau pembebasan manusia dari segala bentuk tirani, kekejaman, kemiskinan dan ketertindasan struktural), dan beriman kepada Allah (menegakkan dimensi transendental dalam kebudayaannya) (Q.S. 3: 110).

Dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa hakikat atau ontologi ilmu penyuluhan pembangunan adalah mempelajari atau mengkaji pola perilaku manusia pembangunan, dan bagaimana pola perilaku manusia itu dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantinya dengan perilaku yang lebih bermartabat dan membawa perbaikan kualitas hidup orang yang bersangkutan dan masyarakatnya. Sedangkan aksiologi atau nilai kegunaan ilmu penyuluhan pembangunan adalah untuk membantu masyarakat, melalui pendidikan, agar mampu dan berdaya menolong dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat hidupnya dan masyarakatnya. Singkatnya, ilmu penyuluhan pembangunan berguna untuk

membantu membentuk masyarakat bermartabat.

Jika hakikat ilmu penyuluhan pembangunan (termasuk dalam pembangunan pertanian) adalah untuk membentuk masyarakat yang bermartabat, maka mengapa fakta menunjukkan pada umumnya penyuluhan pembangunan pertanian Indonesia justru tidak menjadikan petani sejati dan mandiri, bahkan mengalami dehumanisasi, yang sesungguhnya bertentangan dengan cita-cita masyarakat bermartabat itu sendiri. Seperti dinyatakan dua pakar penyuluhan pembangunan Indonesia, yaitu: (a) timbul persepsi masyarakat bahwa penyuluhan pertanian juga alat untuk meningkatkan produksi pertanian, dan bukan sebagai usaha unik untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan petani (Slamet, 2001); (b) praktek penyuluhan pertanian tanpa disadari telah menyimpang dari tujuan esensial, menjadikan petani rasional dan mandiri, tetapi justru selalu tergantung kepada dan digantung oleh pemerintah (Padmanagara, 1995).

Jadi, yang diperlukan sekarang adalah mewujudkan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berjalan di atas falsafah dan tujuan dasarnya, yaitu menolong menjadikan petani dan keluarganya untuk mampu dan berdaya, melalui pendidikan, agar mereka mandiri, sejahtera, sejati, dan bermartabat.

PRADIGMA TEORI PERUBAHAN BAHAN SOSIAL

Epistemologi atau cara mendapatkan ilmu penyuluhan pembangunan itu sama dengan ilmu-ilmu

sosial lainnya, yaitu melalui metodologi ilmiah. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana disiplin ilmu itu lahir, berkembang, dan mengalami perubahan. Pertanyaan ini terkait dengan istilah paradigma ilmu yang menjadi sangat terkenal setelah Khun (1962) menerbitkan buku berjudul *'The Structure of Scientific Revolution'*, yang menguraikan proses kelahiran, perkembangan, dan perubahan suatu ilmu. Menurut Khun, suatu disiplin ilmu lahir bukan melalui proses akumulasi linier dari serangkaian pembuktian hipotesis, namun sebagai akibat proses transformasi revolusioner yang dimulai dengan penciptaan seperangkat paradigma (Suwarsono dan So, 2000). Paradigma adalah : (a) kerangka referensi, definisi situasi atau bentuk umum pandangan dunia yang menjadi dasar pijakan keyakinan suatu teori (Khun, 1962) ; (b) konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan dan prosedur yang digunakan oleh nilai dan tema pemikiran (Popkewitz, 1984 dalam Fakhri, 2002a); (c) tempat berpijak atau alat cara pandang suatu teori dalam melihat realitas sosial (Fakhri, 2002a), karena konstelasi teori dikembangkan untuk memahami dan memberi makna atas kondisi sejarah dan realitas sosial.

Konsolidasi paradigma itu tercapai jika mendapat pengakuan dari masyarakat ilmiah pendukungnya melalui berbagai kegiatan ilmiah, yaitu: penelitian klasik, penulisan dan penerbitan buku teks, serta pengembangan dan penerapan kurikulum. Konsolidasi paradigma menunjukkan pola umum, persoalan pokok, metode

dan alat analisis serta kemungkinan pemecahan masalah yang diajukan oleh ilmu tersebut (Friedrichs dalam Suwarsono dan So, 2000). Kekuatan paradigma terletak pada kemampuannya mengarahkan kepada: apa yang dilihat dan bagaimana cara melihat, apa yang ingin dan tidak ingin diketahui, apa yang dianggap masalah, dan masalah apa yang bermanfaat dipecahkan, serta metode yang digunakan di dalam penelitian dan penerapan (Khun, 1962); sehingga satu paradigma dapat mempengaruhi pandangan tentang 'adil atau tidak adanya' fenomena dan 'baik atau buruknya' program. Misalnya, tentang relasi laki-laki dan perempuan atau majikan dan buruh; suatu paradigma melihat *"hubungan yang harmonis, saling membantu dan tidak ada masalah;* tetapi paradigma lain menyebutnya *hubungan yang hegemonik, dominasi jender dan eksploitatif"*. Adalah tidak relevan membahas paradigma mana yang benar atau salah, karena setiap paradigma punya visi, nilai dan semangat tertentu ketika melihat fenomena. Kemenangan satu paradigma atas paradigma lain itu karena kekuasaan dan kekuatan pendukung paradigma yang menang itu lebih besar dan kuat (bukan karena paradigmanya lebih benar) daripada kekuasaan dan kekuatan pendukung paradigma yang kalah itu (Ritzer, 1975 dalam Fakhri, 2002a).

Menurut Khun (1962) tidak lama setelah paradigma mencapai kemapanan biasanya akan muncul penyimpangan, dan ketika beban penyimpangan makin besar yang tidak dapat diatasi oleh paradigma itu, ma-

ka terjadi 'revolusi ilmiah'. Paradigma baru lahir dan memantapkan definisi serta metode kajian baru, buku teks dan jawaban atas isu-isu standar. Pada batas tertentu, pendapat Khun itu (Suwarsono dan So, 2000) dapat membantu menjelaskan perubahan perspektif pembangunan. Perspektif modernisasi (lahir tahun 1950) sebagai paradigma menguji pembangunan negara-negara di dunia ketiga, yang ditandai hasil-hasil kajian Rostow, McClelland, Inkeles, Bellah, dsb, sangat mempengaruhi agenda penelitian dan program pembangunan; yaitu bagaimana nilai-nilai tradisional dapat diubah untuk memfasilitasi proses pembangunan guna mengikuti modernisasi Amerika Serikat. Ketika perspektif modernisasi gagal menjelaskan apa yang terjadi di Amerika Latin tahun 1960-an, lahirlah perspektif baru (yaitu: dependensia) yang ditandai dengan hasil-hasil kajian Dos Santos, Frank, dan Baran, telah merumuskan agenda penelitian untuk menguji akibat negatif dominasi asing; maka terjadilah perdebatan paradigma. Namun model Khun tidak dapat menjelaskan keuletan paradigma lama dari serangan paradigma baru. Ketika dependensia makin populer di kalangan muda akademisi, memang modernisasi kehilangan daya persuasi di akhir tahun 1960 dan perspektif sistem dunia mulai memberi daya tarik di tahun 1970; tetapi tidak cukup bukti perspektif modernisasi lenyap dan mati, karena penelitian dan jurnal modernisasi tetap berlangsung. Khun juga tidak melihat kemampuan paradigma melakukan adaptasi (contoh: muncul perspektif modernisasi

baru), dan juga tidak mengenal adanya kemajemukan teori, ketika literatur pembangunan dicirikan koeksistensi damai antara perspektif modernisasi, dependensia dan sistem dunia, sejak pertengahan tahun 1970, karena tidak satupun dari ketiga perspektif itu yang mampu secara total menghilangkan peran perspektif lain dan kemudian tegak sendirian (Suwarsono dan So, 2000; Fakhri, 2002a).

Uraian mengenai peta paradigma ilmu-ilmu sosial (termasuk perspektif pembangunan) diperlukan mengingat ada pertanyaan dasar yang muncul sejak lama dan menimbulkan debat panjang, dimana para pemikir ilmu-ilmu sosial (Comte, Durkheim, Weber, Marx, Stuart Mill, dsb) memberi jawaban dengan sangat hati-hati. Pertanyaannya ialah: *where is science in social science?* Neuman (1997) dalam buku *Social Research Methods* menjelaskan, pertanyaan itu memiliki jawaban ganda, dimana para peneliti ilmu sosial dapat memilih dari tiga paradigma alternatif yang tersedia, yaitu: (a) *positivisme*, (b) *ilmu sosial interpretif/tafsir*, dan (c) *ilmu sosial kritis*. Habermas (dalam Fakhri, 2000a) menyebutnya: (a) *instrumental knowledge*, (b) *interpretive knowledge*, dan (c) *emancipatory knowledge*. Setiap paradigma memiliki perangkat asumsi dan prinsip filosofis, teori, dan pendirian teknik penelitian tertentu. Namun, pertanyaan paling penting yang harus dijawab adalah, apa manfaat dan bagaimana sikap memahami paradigma ilmu sosial. Memahami suatu paradigma dan teori perubahan sosial, menurut Kun-

towijoyo (1998) dan Fakhri (2002a), adalah dalam rangka untuk menegakkan komitmen terjadinya proses emansipasi, humanisasi, liberasi, transformasi dan keadilan sosial. Sehingga pilihan terhadap paradigma dan teori atau perspektif pembangunan, bukan semata karena alasan benar atau salahnya suatu teori, tetapi lebih pada keyakinan teori mana yang berimplikasi dapat menciptakan hubungan-hubungan dan struktur sosial yang lebih emansipatif, liberatif, transformatif, dan adil.

Positivisme atau **instrumental knowledge** adalah paradigma yang dianut oleh Auguste Comte (1798–1857), Emile Durkheim (1858–1917), J. S. Mill (1806–1873) dan paling luas dipakai dalam ilmu-ilmu sosial. Positivisme ilmu-ilmu sosial adalah pendekatan ilmu-ilmu sosial yang dipinjam dari pendekatan dan metode ilmu-ilmu alam, ketika memahami dan mendominasi realitas objek studi, dan memberikan penjelasan bersifat universal dan generalisasi (percaya ada pola hukum tetap atas fenomena tertentu di semua tempat dan waktu). Positivisme memandang ilmu-ilmu sosial sebagai metode terorganisasi yang mengkombinasi logika deduktif dengan pengamatan empiris-seksama atas perilaku individu untuk menemukan seperangkat hukum sebab-akibat bersifat peluang (*probabilistic*), yang dapat dimanfaatkan memprediksi pola umum aktivitas manusia. Contoh teori positivisme yang terkenal adalah teori sosiologi “struktural-fungsional” yang berakar pada filsafat keteraturan, ketertiban, keterpaduan dan stabilitas sosial,

yang mengedepankan rekayasa sosial dalam perubahan sosial. Penelitian dilakukan dengan metode ilmiah ber-ciri obyektif (tidak subjektif), netral (tidak memihak), rasional (tidak emosional dan tidak empati), bebas nilai, dan menjaga jarak terhadap objek studi; serta lebih sering melalui eksperimen atau survey yang memanfaatkan data kuantitatif (Neuman, 1997).

Ilmu sosial interpretatif/tafsir atau interpretive knowledge ialah paradigma yang dianut Marx Weber (1864–1920) dan Wilhelm Dilthey (1833–1911) [disebut *Chicago School of Sociology*] yang memandang, ilmu-ilmu alam itu berdasarkan pada *erklarung* (*abstract explanation*) atau penjelasan-penjelasan abstrak tentang fenomena alam, sedangkan ilmu-ilmu sosial lebih berakar pada *verstehen* atau pemahaman empatik, yang diperlukan untuk mempelajari tindakan sosial dengan tujuan tertentu (*meaningful social action*) yang terkait dengan pikiran-pikiran dan motivasi-motivasi personal. Ilmu sosial interpretatif berkaitan dengan *hermeneutics*, yang ditemukan dalam ilmu-ilmu *humanity* (filosofi, sejarah, budaya, bahasa, sastra, dan studi agama), yang menyatakan ilmu-ilmu sosial itu hakikatnya dimaksudkan untuk memahami fenomena sosial apa adanya (semboyannya: “biarkan fakta bicara atas nama dirinya sendiri”). Penelitian dikerjakan dengan metodologi kualitatif melalui pengamatan partisipatif serta penelitian lapangan langsung dan rinci didalam suasana alami untuk mencapai suatu pemahaman

dan intepretasi bagaimana manusia menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka (Neuman, 1997).

Ilmu sosial kritis atau ***emancipatory knowledge*** adalah paradigma yang dianut oleh Karl Marx (1818–1883), Sigmund Freud (1856–1939), Erich Fromm (1900–1980), Jurgen Habermas (1929-) yang dikenal dengan *Frankfurt School*. (Anthony Gramsci dan Paulo Freire juga menganut paradigma ini walaupun dengan varian yang berbeda). Paradigma ini mendefinisikan ilmu-ilmu sosial sebagai proses kritis dari *inquiry* (penelitian alamiah), yang bekerja melebihi batas-batas permukaan ilusi untuk membongkar struktur-struktur nyata di dalam dunia material, guna menolong orang-orang yang termarginalkan dan tertindas, merubah kondisinya dan membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil bagi mereka. Karenanya paradigma ini menganjurkan ilmu-ilmu sosial tidak boleh netral dan tidak hanya terlibat dalam teori abstrak-spekulatif, tetapi selalu mengamati realitas sosial dalam perspektif kesejarahan, yang dikaitkan dengan pemihakan atas upaya emansipasi kehidupan masyarakat sehari-hari (Neuman, 1997). Biasa disebut sebagai metodologi alternatif, yang berdasar pada dialektika materialisme, analisis kelas, dan strukturalisme, dengan pendekatan holistik, yang menghindari cara berfikir deterministik dan reduksionis. Sehingga ilmu sosial kritis tidak menempatkan rakyat sebagai objek penelitian yang pasif dan objek rekayasa sosial yang dirancang para ahli perencana di luar; tetapi menempatkan rakyat sebagai subjek utama

proses perubahan dan perencanaan sosial, serta penciptaan dan pengawasan atas pengetahuan yang diperoleh melalui *participatory research* (penelitian partisipatori).

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa ilmu penyuluhan pembangunan lahir dari perspektif modernisasi, yang mengkaji bagaimana pola perilaku manusia pembangunan terbentuk, bagaimana perilaku manusia dapat berubah atau diubah dari perilaku lama (dapat ditafsirkan sebagai tradisional atau juga stagnan) menuju perilaku baru (dapat ditafsirkan sebagai modern dan bermartabat) melalui pembangunan. Ilmu penyuluhan pembangunan diperoleh dan dikembangkan (epistemologi) melalui paradigma positivisme, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti jalan interpretative dan kritis melalui penelitian dengan metodologi kualitatif-partisipatif. Sedangkan aksiologi atau nilai kegunaan ilmu penyuluhan pembangunan adalah untuk membantu masyarakat, melalui pendidikan, agar mampu dan berdaya menolong dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat hidupnya dan masyarakatnya. Singkatnya, ilmu penyuluhan pembangunan berguna untuk membantu dan memfasilitasi pembentukan masyarakat bermartabat. Namun pada praktiknya pernah terjebak sebagai alat untuk meningkatkan produksi (misal: pertanian padi) dan mengabaikan peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kondisi ini yang menyebabkan munculnya kembali penegasan

perspektif ilmu penyuluhan pembangunan yang hakikatnya untuk membantu memberdayakan masyarakat (termasuk petani menuju kesejatiannya) melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Untuk mewujudkan petani sejati dan bermartabat (yang berdaya secara sosial, ekonomi, dan berwawasan ekologi; yang ditandai dengan tingkat modernitas, partisipasi dan daya saing petani); harus lebih dahulu mempelajari tentang sistem pendidikan petani (apakah memberdayakan petani), kelembagaan penyuluhan pertanian (apakah kompatibel dan efektif dengan kesejatan petani), serta apakah peran negara dan lembaga terkait kondusif dan menopang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syamsuddin. 1995. "Sembilan Puluhan Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia." Dalam *Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Prosiding Lokakarya* 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- _____. 1999. "Pengantar Edisi Indonesia." Dalam Reijntjes, Coen; Haverkort, Bertus; dan Waterbayer, Ann (eds) *Pertanian Masa Depan: Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah* (terjemahan). Yogyakarta: Kanisius.
- Fakih, Mansour. 2002a. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan Insist Press.
- Giddens, Antony. 1998. *The Third Way*. Blackwell Publisher Ltd.
- Korten, David. C. 2002. *Kehidupan Setelah Kapitalisme (The Post Corporate World—alih bahasa)*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 1998. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Pembinaan Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan*. Makalah untuk Raker-nas ICMI, tanggal 10 Juli 1999 di Bandung.
- Misra, R.P. 1981. "The Changing Perception of Development Problems." Dalam Misra, R.P dan M. Honjo (eds.) *Changing Perception of Development Problems*. Volume 1. Maruzen Asia for and on behalf of the United Nations Centre for Regional Development. Singapore.
- Neuman, Lawrence. W. 1997. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon Publisher.
- Padmanagara, Salmon. 1995. "Sumbang Saran Tambahan Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II." Dalam *Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap II. Prosiding Lokakarya* 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Puspadi, Ketut. 2001. "Rekonstruksi Sistem Penyuluhan." *Makalah*, yang merupakan bagian dari disertasi penulis, disampaikan pada Seminar

- PERHIPTANI di Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 21 Oktober 2001.
- Reijntjes, Coen; Haverkort, Bertus; dan Water-Bayer, Ann. 1999. *Pertanian Masa Depan: Pengantar untuk Pertanian Berkelanjutan dengan Input Luar Rendah* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Schoorl, J.W. 1988. *Modernisasi : Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Slamet, Margono. 1992. "Perspektif Ilmu Penyuluhan Pembangunan Menyongsong Era Tinggal Landas." Dalam Aida V.S. Hubeis, dkk (eds) *Penyuluhan Pembangunan di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara..
- _____. 1995. "Sumbang Saran Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II." Dalam *Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Prosiding Lokakarya* 4-5 Juli 1995. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- _____. 2000. "Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan." Makalah Seminar Nasional Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, IPB, 25-26 September 2000. Bogor.
- _____. 2001. "Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah." *Makalah Seminar PERHIPTANI di Universitas Siliwangi Tasikmalaya 21 Oktober 2001*. IPB, Bogor.
- Soebiyanto, F.X. 1998. "Peranan Kelompok dalam Pengembangan Kemandirian Petani dan Ketangguhan Berusahatani." *Disertasi PPs IPB, Bogor* (tidak diterbitkan).
- Sumardjo. 1999. "Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani." *Disertasi PPs IPB, Bogor* (tidak diterbitkan).
- Susanto, Djoko. 2000. "Pendekatan Paradigma Baru Ilmu Penyuluhan Pembangunan." *Makalah Seminar Nasional Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, IPB, 25-26 September 2000, Bogor*.
- Suwarsono dan So, Alvin Y. 2000. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Wahono, Francis. 1994. "Dinamika Ekonomi Sosial Desa Sesudah 25 tahun Revolusi Hijau." Dalam *PRISMA*, No. 3, Maret 1994. Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- _____. 1999a. "Petani: dari Konflik menuju Demokrasi." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. IV/1999. Penerbit Insist, Yogyakarta.
- _____. 1999b. "Revolusi Hijau : dari Perangkap Involusi ke Perangkap Globalisasi." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. IV/1999. Penerbit Insist, Yogyakarta.
- _____. 2000. "Menuju Penguatan Hak-hak Petani: Melalui Gerakan Petani Organik." Dalam *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA*, No. VII/2000. Penerbit Insist Press, Yogyakarta.
- _____. 2004. "Depolitisasi Pangan: Sebuah Upaya Mengangkat Kearifan Lokal dan Mendayagunakan Keanekaragaman Hayati." Dalam Wahono dkk. (eds) *Pangan, Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati*. Yogyakarta: Penerbit Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.